

**UPAYA KESBANG LINMAS POL DALAM PEMBANGUNAN
POLITIK MASYARAKAT DI DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

HERI ISMANTO

NPM : 09 851 0037

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

2 0 1 3

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

ABSTRAK

UPAYA KESBANG LINMAS POL DALAM PEMBANGUNAN POLITIK MASYARAKAT DI DELI SERDANG

O L E H

HERI ISMANTO

NPM : 09 851 0037

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Wilayah kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Deli Serdang bergerak dalam Wilayah kerja yang begitu besar dan kompleks, yaitu bergerak di bidang penguatan Ideologi, Politik, ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan Rakyat semesta (IDEOPOLEKSOSBUDHANKAMRATA). Terlebih pada era reformasi seperti sekarang ini, yang dirasakan kebablasan. Reformasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya pengenduran sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Pengenduran ini akibat dari kiris multidimensi yang berawal dari krisis moneter tahun 1997/1998, sesungguhnya juga problematika mendasar adalah munculnya gejala disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, disamping itu juga muncul masalah pertikaian diantara warga yang SARA yang tentu sangat sulit untuk di selesaikan.

Permasalahan yang diajukan adalah "Bagaimana upaya Kesbang Linmas Pol dalam pembangunan politik masyarakat di Deli Serdang".

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dari hasil temuan penelitian didapat bahwa pemahaman politik di kalangan masyarakat agak rendah dan juga didapat bahwa rata-rata mereka mendapatkan pengetahuan politik dari keluarga. Partisipasi politik di kalangan masyarakat agak rendah, kategori ini didapat melalui serangkaian tanggapan berupa sikap-sikap yang apatis dan keinginan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik seperti : pemilu di samping itu banyak para masyarakat beranggapan bahwa para kontestan pemilu tidak mewakili aspirasi mereka dalam hal menyampaikan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Dari temuan penelitian didapat bahwa hubungan antara upaya Kesbang Linmas terhadap pembangunan politik masyarakat sangat rendah (0,3158). Penelitian ini juga menyarankan Pemahaman politik perlu diperbaiki agar lebih memberikan hasil yang diharapkan. Seperti meningkatnya partisipasi politik hal ini dapat dilakukan pendidikan yang lebih intensif dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dan selanjutnya dapat meningkatkan kesadaran politik para masyarakat.

Kata Kunci: Kesbang Linmas Pol, Politik, Masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

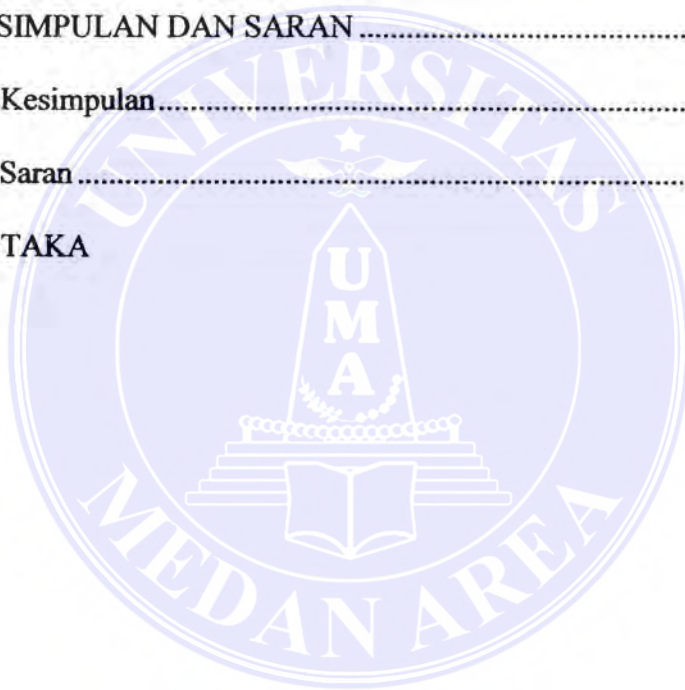


DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Hipotesis	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Masyarakat	10
B. Pengertian Pembangunan	11
C. Pengertian Pendidikan Politik	14
D. Partisipasi Politik.....	26
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Populasi dan Sampel	32
B. Metode Pengumpulan Data	33
C. Variabel dan Definisi Operasional	33
D. Teknik Analisis Data	34

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	36
A. Sejarah Kabupaten Deli Serdang.....	36
B. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang.....	41
C. Struktur Organisasi Kesbang Linmas Pol Kabupaten Deli Serdang.....	44
BAB V. ANALISIS DATA	52
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah kata kunci (*Key word*) dalam keberlangsungan tata pemerintahan sebuah daerah. Kata pembangunan (*Develofment*) mengandung dua hakikat pemaknaan yang berbeda yang pertama, pembangunan di arahkan pada wujud material atau fisik, yaitu sebuah pembagunan di bidang sarana dan prasarana untuk tercapainya kelancaran dari tujuan sebuah rencana pembangunan. Yang kedua, kata pembangunan diarahkan pada aspek non fisik atau pembangun sikap mental.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya materil/ fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental dijadikan sebagai proses menjadi ini berarti menunjukkan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang paripurna. Dengan kata lain Proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah Negara guna membangun karakter bangsa (*National and Caracther Building*).

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Deli Serdang adalah dengan menggunakan pendekatan preventiv (ideologis) dan reaktif (praksis). Pendekatan

preventif dilakukan melalui serangkaian pelatihan/pendidikan di kalangan generasi muda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Cendekiawan, akademisi, Praktisi Ormas/Lsm, maupun Politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Metodologi yang kedua dengan menggunakan pendekatan reaktif (praksis) yaitu Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Deli Serdang bersama dengan jajaran/lembaga lainnya yang terkait menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Bupati Deli Serdang untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Meningat kondisi Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah Penduduk sekitar 1,956,996 (Data Tahun 2012), dengan luas wilayah 2.394,62 Km², dengan tingkat partisipasi masyarakat yang semakin meningkat ini di tandai dengan banyaknya penyampaian aspirasi masyarakat Kabupaten Deli Serdang baik melalui demonstrasi atau pun penyampaian langsung oleh para wakil rakyatnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Maka hal ini menandakan keberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD tahun 2009-2014 yaitu Formulasi Fungsi dan Peran Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan dengan sasaran: Pertama, Meningkatnya peran dan fungsi legislative dalam pemerintahan, dan kedua, meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik.

Fakta lain meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik adalah dengan banyaknya pembentukan Ormas/LSM di Kabupaten Deli Serdang yang sampai dengan Desember 2010 sudah terdapat 141 Ormas/LSM yang tersebar di daerah Kabupaten Deli Serdang dengan fokus kegiatan yang berbeda-beda.

Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Deli Serdang untuk dapat mengarahkan peningkatan potensi aspirasi masyarakat Kabupaten Deli Serdang untuk sesuai dengan apa yang di cita-citakan dan terhindar dari kekacauan (*Chaos*). Peningkatan peran masyarakat ini tentu dalam iklim demokrasi adalah sebuah kesuksesan namun tanpa dibarengi dengan aturan hukum (*rule of law*) yang jelas, tegas dibarengi kesadaran yang tinggi akan menimbulkan berbagai problema baru dan mungkin akan berakhir pada kategori Negara gagal/Daerah gagal (*failed state*). Hal ini menjadi bahan dalam perencanaan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Deli Serdang untuk dapat terus memonitoring dan mengarahkan potensi yang baik ini demi terwujudnya kelangsungan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Wilayah kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Deli Serdang bergerak dalam Wilayah kerja yang begitu besar dan kompleks, yaitu bergerak di bidang penguatan Ideologi, Politik, ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan Rakyat semesta (IDEOPOLEKSOSBUDHANKAMRATA). Terlebih pada era reformasi seperti

sekarang ini, yang dirasakan kebablasan. Reformasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya pengenduran sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

Pengenduran ini akibat dari kiris multidimensi yang berawal dari krisis moneter tahun 1997/1998, sesungguhnya juga problematika mendasar adalah munculnya gejala disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, disamping itu juga muncul masalah pertikaian diantara warga yang SARA yang tentu sangat sulit untuk di selesaikan.

Efhoria reformasi ini tentu menjadi sebuah kenyataan yang harus disikapi secara serius karena dapat memicu perpecahan, pertikaian, perebutan kekuasaan, dan tuntutan demokrasi dalam segala aspek kehidupan yang di ekspesikan secara ekstrim atau radikal hingga melanggar etika hukum dan norma yang belaku. Demokratisasi dalam apek berbangsa dan bernegara dipandang perlu namun tuntutan tersebut harus melalui proses yang gradual/terstruktur/sistematik dengan mengacu pada norma hukum dan etika budaya bangsa sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam kehidupan berbanbgsa dan bernegara. Demokrasi tanpa aturan dan norma hukum hanya akan menimbulkan anarki.

Maka dalam hal ini aalah suatu hal yang menarik untuk mengetengahkan judul skripsi yaitu “Upaya Kesbang Linmas Pol Dalam Pembangunan Politik Masyarakat di Deli Serdang”.

B. Perumusan Masalah

Setiap kejadian yang timbul pada diri manusia maka akan mengakibatkan timbulnya permasalahan, dan biasanya dengan kemampuannya dia akan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut secara rasional dan objektif.

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilakukan (dengan jalan mengatasinya) apabila kita ingin berjalan terus.

Selanjutnya setiap permasalahan yang ada agar tidak mengambang dan membingungkan maka dibuatlah suatu perumusan masalah, yang bertujuan agar masalah tersebut jelas batasannya, kedudukannya dan sekaligus mencari alternatif pemecahannya.

Berdasarkan pemikiran di atas dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana upaya Kesbang Linmas Pol dalam pembangunan politik masyarakat di Deli Serdang”.

C. Pembatasan Masalah

Ditinjau dari judul yang penulis sajikan dapat diambil suatu pembatasan masalah yaitu :

1. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan Kesbang Linmas Pol dalam pelaksanaan pembangunan politik masyarakat di Deli Serdang.
2. Penelitian dilakukan pada tahun 2012.

D. Tujuan Penelitian

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh data dan informasi sekaligus membuktikan tentang peranan Kesbang Linmas Pol dalam pembangunan politik masyarakat di Deli Serdang.
2. Sebagai syarat untuk memenuhi tugas akademi dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.
3. Penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang untuk dipakai dalam merumuskan kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum melangkah lebih lanjut, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan kerangka dasar teori sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (2006:65):

Kerangka dasar teori adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas yang nantinya berguna untuk memperkuat permasalahan dan membantu peneliti dalam memperjelas menetapkan objek penelitian, instrumen, pengumpulan data serta wilayah pengambilan data.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional terdapat dalam Undang-undang Dasar alinea ke-IV yaitu: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan abadi dan keadilan sosial.

Tujuan Nasional di atas sangat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap tingkatan, dari tingkatan pusat sampai ke tingkat yang terendah yaitu desa atau kelurahan.

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan, salah satu kunci keberhasilan dari setiap usaha pembangunan.

Menurut Winardi (2009:54) keikutsertaan atau partisipasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

Partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai turut sertanya seorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih pada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi yang bersangkutan terdapat dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.

Begitupun berhasilnya kegiatan yang dilakukan lebih banyak ditentukan oleh faktor orang-orang yang menjadi aparat pemerintahan desa. Kemampuan manajerial dari aparat pemerintahan desa dalam merangkul dan memberdayakan lembaga ataupun kelompok masyarakat sangatlah dibutuhkan, karena bagaimanapun partisipasi yang dibangun tidak akan dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya keterbukaan kemampuan dan kegigihan dari aparat pemerintah desa

sendiri.

Karena itu untuk menjelaskan hal-hal di atas, maka peranan komunikasi antara pemerintahan dan masyarakat haruslah terbangun dengan baik.

T. Hani Handoko (2001:272) mengatakan bahwa: “Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain”.

Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik vokal dan sebagainya dan pemindahan yang efektif memerlukan tidak hanya transformasi data, tetapi sangat tergantung pada ketrampilan-ketrampilan tertentu (membaca, mendengar, berbicara, melihat dan lain-lain), untuk membuat suksesnya pertukaran informasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.
3. Kemampuan manajerial aparat pemerintah kecamatan dalam rangka dan memberdayakan lembaga dan kelompok masyarakat akan menentukan partisipasi masyarakat.

F. Hipotesis

Setelah peneliti mengadakan pendataan untuk menentukan kerangka dasar, maka langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan

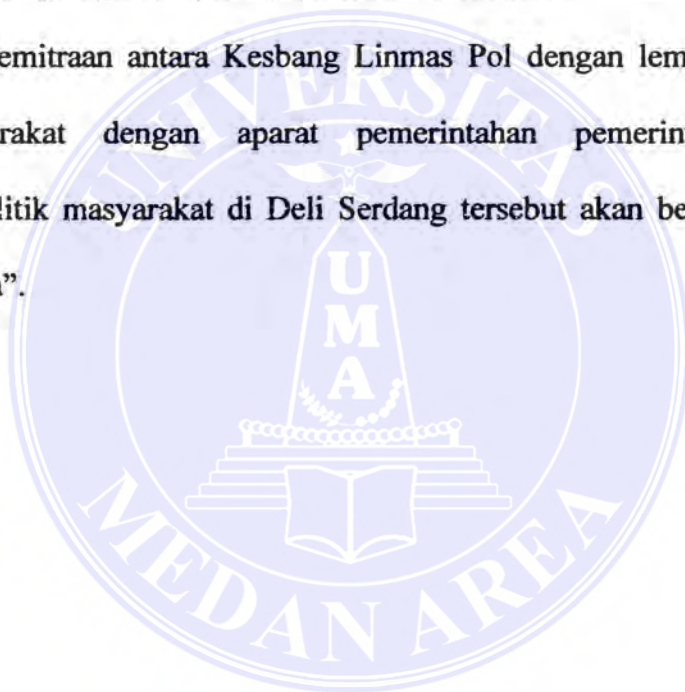
suatu pernyataan yang penting kedudukannya di dalam penelitian.

Kartini Kartono (2006:70) mengatakan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diuji kebenrannya dengan jalan research. Oleh karena itu hipotesa adalah dugaan yang mungkin banar atau munkgin juga salah”.

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

“Semakin baik kemitraan antara Kesbang Linmas Pol dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan aparat pemerintahan pemerintahan, maka pembangunan politik masyarakat di Deli Serdang tersebut akan berjalan dengan semakin baik pula”.



BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Masyarakat

Pengertian masyarakat, penulis mengutip pendapat seorang ahli dibidang sosiologi, yaitu Hasan Shadily (2000:31) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain”.

Dapat diketahui bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang terdiri dari berbagai golongan yang saling mempengaruhi.

Sedangkan menurut Max Iver dan Page yang dikutip Soerjono Soekanto (2002:22) memberikan definisi masyarakat sebagai berikut :

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan masyarakat selalu berubah.

Walaupun definisi yang diberikan para sarjana sosial tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya adalah sama, yaitu masyarakat mencakup beberapa unsur antara lain :

1. Manusia hidup bersama, berarti orangnya minimum dua atau lebih
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tidak sama

dengan kumpulan benda mati. Oleh karena manusia adalah bertambah, yang menghasilkan manusia-manusia baru yang dapat berbicara. Mereka juga berkeinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaan kepada teman-temannya. Sebagai akibat itu timbullah sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompoknya.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama untuk menimbulkan kebudayaan. Oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lain.

B. Pengertian Pembangunan

Menurut Talizuddin Ndrata (2007:35) pembangunan dapat diartikan sebagai “usaha yang diselenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan-perubahan dan pertumbuhan di segala bidang dalam rangka mencapai tujuan negara dan bangsa”.

Sedangkan Sondang P. Siagian (2007:2) mendefinisikan pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa”.



Berbicara mengenai pembangunan maka kita harus mengerti apa arti pembangunan. Pembangunan adalah perubahan keadaan yang lebih baik dilaksanakan secara sadar dan terus menerus.

Hakekat daripada pembangunan itu sendiri adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Disini jelas terlihat bahwa pembangunan seluruh masyarakat Indonesia dalam ikatan bangsa Indonesia yang mencerminkan situasi tersebut.

Dilihat dari uraian di atas dapatlah digambarkan betapa luasnya bidang-bidang pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia dan memerlukan partisipasi dari sebanyak mungkin seluruh penduduk Indonesia.

Tetapi kadang kala perubahan tidak dilihat dari segi aspek lingkungan masyarakat tersebut, misalnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sehingga Pembangunan yang ditetapkan itu hanya berlaku di dalam konsep, dan segala yang dicita-citakan itu hampa adanya.

Oleh sebab itu berhasilnya Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin seluruh rakyat Indonesia serta para penyelenggara negara.

Dapat diterangkan lebih lanjut bahwa proses ini bukan merupakan proses yang mudah dan tidak tanpa gejolak maupun perasaan yang sering emosional, mengingat bahwa titik tolak Pembangunan bangsa ialah suatu bentuk Bhinneka,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

dengan perbedaan dalam kebiasaan maupun tata nilai kelompok masyarakat. Adapun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bukanlah suatu kegiatan yang asal jadi ataupun meniru dan mengikuti mode pembangunan yang dilaksanakan di negara lain melainkan sungguh-sungguh didorong oleh keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dan martabat masyarakat Indonesia.

Hal inilah yang merupakan cita-cita dari mendirikan Negara Kesatuan RI dalam Tahun 1945. Karena itu pula kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan bagian integral dari perjuangan bangsa Indonesia.

Keinginan untuk merdeka sangat erat hubungannya akan adanya suatu citra tentang masa depan, suatu citra diri bangsa Indonesia, yang ditentukan oleh pengalaman masa lampau.. Sejak semula para ahli menyadari bahwa manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, dan sehubungan dengan itu terbentuklah suatu citra tentang masa depan yang menjadi pendorong bagi kegiatan manusia selanjutnya.

Kita juga mengetahui bahwa pembangunan mempunyai tujuan yaitu terdiri dari jangka panjang, jangka menengah , jangka pendek. Dan untuk melaksanakan pembangunan itu diperlukan adanya kemampuan untuk melaksanakannya.

Adapun kemampuan yang dimaksud ialah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas, yang terdiri dari beberapa variabel yaitu :

1. Kepemimpinan
2. Struktur organisasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

3. Sarana dan fasilitas yang terbagi atas :

- a. Sarana fisik
- b. Biaya
- c. Skill
- d. Peraturan-peraturan dan perundangan yang melandasi tata kerja kegiatan organisasi.

4. Teknologi yaitu cara yang digunakan oleh organisasi yang bersangkutan di dalam proses pekerjaan untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian jelaslah bahwa pembangunan bukan saja sebagai perubahan tetapi juga sebagai :

1. Sebagai suatu proses evolusi.
2. Mencakup bidang materi dan non materi yang dihubungkan dengan kemajuan teknologi.
3. Pemikiran tentang pembangunan sebagai suatu arah gerak yang penting dalam kemajuan pembangunan secara bertahap.
4. Adanya keterbatasan dalam pembangunan di sektor ekonomi disebabkan keterbatasan daya tampung lahan ekonominya.

C. Pengertian Pendidikan Politik

Istilah Pendidikan Politik memang telah lama menjadi wacana didunia elit politik, Pendidikan politik masyarakat senantiasa menjadi amanat yang dipikulkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

di pundak para politisi, oleh organisasi partainya. Namun pada tatanan realitas mereka lebih sering disibukkan dengan persaingan-persaingan, intrik-intrik, dan mobilisasi massa untuk tujuan-tujuan politik praktisnya, ketimbang memikirkan proses pendidikan massanya agar memiliki kesadaran, wawasan dan partisipasi politik yang baik.

Pendidikan politik menurut Alfian (1986: 235) merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedang menurut Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Safrudin, pendidikan politik adalah aktivitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi politik pada individu, meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik.

Di samping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik yang aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis. Dengan

demikian pendidikan politik memiliki tiga tujuan: membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, serta bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu menjadi partisipan politik dalam bentuk yang positif. Pembentukan kepribadian politik dapat dilakukan melalui metode secara tidak langsung yaitu sosialisasi dan pelatihan, serta metode yang bersifat langsung yaitu pengajaran politik melalui institusi pendidikan.

Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh dengan dialog dan pengajaran instruktif. Adapun partisipasi politik, terwujud dalam keikutsertaan individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Jika hal-hal tersebut dapat terbentuk dalam jiwa setiap warga negara yang ditegakkan dengan pilar-pilar ideologi, spiritual, moral dan intelektual, maka diharapkan bangsa ini akan menjadi bangsa yang berkarakter, dan dapat mengantarkan rakyat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan besar.

Jika pendidikan merupakan proses menumbuhkan sisi-sisi kepribadian manusia secara seimbang dan integral, maka pendidikan politik dapat dikategorikan sebagai dimensi pendidikan, dalam konteks bahwa manusia adalah makhluk politik (*zoonpoliticon*). Sebagaimana halnya bahwa pendidikan memiliki fungsi-fungsi moral dan ekonomi, maka pendidikan politik juga mempunyai fungsi politik yang akan direalisasikan oleh lembaga-lembaga pendidikan.

Dikemukakan oleh Safrudin, bahwa pendidikan politik akan menyiapkan segenap anak bangsa untuk menggeluti persoalan sosial dalam kehidupan dalam

bentuk atensi dan partisipasi politik, menyiapkan mereka untuk mengemban tanggung jawab dan memberi kemungkinan kesempatan mereka melaksanakan hak dan kewajibannya. Sehingga mereka paham terhadap ideologi politik yang dianutnya, untuk kemudian membelanya dengan mewujudkan cita-cita diri dan bangsanya. Pendidikan politik diharapkan merupakan proses mentransfer nilai-nilai dan ideologi politik ke setiap generasi penerus bangsa dalam rangka membentuk watak bangsa (national character building).

Pendidikan politik juga harus memiliki dasar-dasar ideologis, sosial dan politik. Dengan demikian pendidikan politik merupakan kebutuhan seluruh warga negara, karena diharapkan dapat membentuk perasaan sebagai warga negara secara benar serta menumbuhkan sifat-sifat nasionalisme, senantiasa berafiliasi, bertanggung jawab dan berbangga akan jati diri bangsa.

Menurut Safrudin, pendidikan politik dalam masyarakat manapun harus memiliki institusi dan perangkat yang menopangnya. Yang paling mendasar adalah keluarga, institusi pendidikan, partai politik, pers dan masyarakat luas (www.blogjurnalistikonline).

a. Partai Politik (parpol)

Salah satu fungsi parpol menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar

akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut pasal 13, partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya. Dalam pasal 31 Undang-Undang tersebut juga dikemukakan, partai politik juga wajib melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan:

- Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kesemua hal tersebut dimaksudkan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Parpol merupakan pilar demokrasi yang juga mempunyai fungsi sebagai penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi rakyat sekaligus sebagai alat perjuangan rakyat untuk mencapai kemakmuran dan keadilan. Selain itu, parpol juga berfungsi sebagai sarana partisipasi politik dan rekrutmen politik.

b. Lembaga Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu)

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pemilihan Umum, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sedangkan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Indonesia. Tugas dan wewenang Bawaslu adalah untuk mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh KPU, menilai dan memberikan masukan atas laporan evaluasi pelaksanaan pemilu yang dibuat KPU, dan mengawasi setiap tahapan pemilu.

Tugas lembaga pemilu formal maupun nonformal, khususnya KPU, senantiasa berbasis dua hal: pertama, melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, serta sosialisasi dan konsultasi publik tentang sistem pemilu yang dilaksanakan. Kedua, memandu masyarakat tentang nilai-nilai berbangsa yang menjadi skala prioritas Pemilu 2009 berdasarkan pemetaan sosiopolitik pemilu, baik pemetaan pemilu sebelumnya maupun kebutuhan pendidikan warga negara di masa yang akan datang. Sehingga diharapkan tercipta pendidikan ketrampilan politik masyarakat melalui skala prioritas tertentu misalnya sifat kritis, respek, berpikir kompetitif serta pemetaan program kerja berbangsa.

c. Pers

Pers mempunyai peran yang sangat strategis dalam pendidikan politik. Media sebagai sumber terbesar sarana membaca mempunyai cara tersendiri untuk memberikan pendidikan dan membentuk pemikiran masyarakat atau memberikan

pembelajaran politik pada masyarakat. Misalnya dalam menyebarluaskan informasi (sosialisasi), tentang proses dan ketentuan pemilu, sistem yang akan digunakan, kinerja peserta pemilu, serta hak dan kewajiban pemilih. Melalui peran tersebut, pers ikut aktif memberikan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik. Bahkan menurut Amal (2008:35), dapat dikatakan bahwa harapan terbesar bagi pendidikan politik bagi warga negara sebenarnya diharapkan dari pers.

Pers juga mempunyai peranan dalam pelaksanaan pemilu dalam hal melaporkan praktik-praktik kecurangan yang dilakukan sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara. Pemilu tidak akan mengalami perbaikan jika publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon legislative dan calon presiden. Informasi melalui pers mengenai pelaksanaan pemilu dan kualitas calon, merupakan sarana bagi publik untuk melakukan fit and proper test untuk menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilakukan jika pers memberitakan sesuatu secara benar dan profesional.

Di dalam sistem demokrasi, persaingan memperebutkan kekuasaan politik dapat dilakukan secara terbuka, dengan menggunakan beragam cara untuk merebut simpati pemilih. Cara tercepat dan termudah salah satunya adalah melalui kspos pers. Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi dan informasi, pers diharapkan dapat ikut memberikan pendidikan pada masyarakat untuk menciptakan pemilu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

yang jujur dan adil serta damai. Hal itu dapat tercapai jika pers selalu berpegang teguh pada prinsip jurnalisisme yang profesional dan beretika. Pers dapat berfungsi optimal mendukung pendidikan politik dengan terlibat secara kritis memberikan gambaran yang lengkap, akurat dan seimbang tentang calon legislatif serta calon presiden dengan tetap bersifat independen.

d. Lembaga Pendidikan

Secara moral, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab secara etis atas persoalan-persoalan politik bangsanya, dengan membenahi etika politik bangsa. Menurut pasal 3 Peraturan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Pembinaan Kesiswaan, materi pembinaan kesiswaan meliputi demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural.

Dunia pendidikan, harus dapat berposisi sebagai penyegaran pandangan, wawasan dan nuansa politik agar generasi muda tidak apatis terhadap persoalan politik. Diperlukan pembenahan etika politik sejak dini melalui pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan adalah bekal masa depan generasi muda. Dengan pengetahuan mendasar tersebut peserta didik tidak hanya diharapkan menjatuhkan pilihan yang benar, namun juga menjadi pelaku politik yang baik. Jika menjadi politikus nantinya, dapat menjadi politikus politik yang beretika.

Menurut Mufid (www.blogjurnalistikonline), dalam hal pendidikan politik, secara makro dunia pendidikan harus dapat menjalankan dua fungsi, yaitu:

- Menjadi pendukung sistem politik dan ideologi negara yang telah diyakini kebenarannya, seperti ideologi Pancasila dan UUD 1945. Karena kedua hal itu sudah diyakini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dunia pendidikan harus menjadi pendukung utama untuk melestarikan dua legitimasi system kenegaraan dan perpolitikan tersebut.
- Mampu melakukan kritik terhadap budaya politik yang dianggap menyeleweng. Fungsi tersebut hanya dapat dilakukan jika para penyelenggara pendidikan bebas dari kepentingan politik praktis kelompok tertentu. Kelemahan fungsi kritik yang dilakukan oleh dunia pendidikan dari tingkat menengah sampai perguruan tinggi dapat menyebabkan kurang berkembangnya budaya politik. Hal tersebut akan membawa implikasi partisipasi politik dalam pemilu bukan didasarkan pada kesadaran dan kekritisian untuk menganalisis berbagai hal. Pemilih-pemilih pemula, sebenarnya membutuhkan penjelasan tentang apa pemilu, demokrasi, hak-hak rakyat, kewajiban warga negara, bagaimana pemilu yang berkualitas, serta bagaimana agar warga negara bisa ikut berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam pesta demokrasi. Untuk melaksanakan fungsi penjas berbagai persoalan tersebut, lembaga pendidikan secara moral memiliki tanggung jawab etis atas persoalan-persoalan bangsa.

Etika politik bangsa harus dibenahi melalui pendidikan politik pada anak

didiknya.

Penelitian yang dilakukan Agus Marsidi (2001) menunjukkan bahwa, guru dapat berperan sebagai desiminator nilai,norma dan perilaku politik secara profesional. Aktualisasi profesionalisme tersebut dapat dilihat dari perspektif orientasi politik guru ketika menjalankan peran penanggung jawab (berdasarkan kompetensi) pendidikan politik secara formal di sekolah. Hal tersebut dapat dibagi menjadi dua macam:

- Jika guru berorientasi kepada kepentingan negara (pemerintah/regime), maka dia berperan sebagai agent, karena dia akan bertindak sebagai mediator atau pelaksanaan sosialisasi politik berdasarkan ideologi penguasa. Guru adalah pencapai target kurikulum yang telah ditetapkan birokrasi pemerintah. Biasanya mereka bersikap sebagai intellectual organic, bagian dari birokrasi dan *state society*, sehingga guru berperan sebagai media untuk legitimasi regime.
- Jika guru berperan sebagai agency, maka dia akabertindak sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki otoritas dalam melaksanakan tugas, berorientasi pada civil society, kreatif dalam mengembangkan hidden curriculum sehingga pendidikan politik yang dilakukan mempunyai tujuan untuk national character building. Peran perguruan tinggi dalam pendidikan politik menjadi sangat strategis karena ia dapat menjadi sebagai intermediasi sebagaimana halnya pers. Walaupun tetap saja memiliki keterbatasan karena ia juga harus bekerja

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menggunakan pers. Sehingga diperlukan terobosan perguruan tinggi melakukan pendidikan politik melalui pendampingan, agar masyarakat lebih kritis mensikapi kompetisi politik secara baik dan secara kuat, apalagi bagi masyarakat yang akan memperjuangkan kepentingan mereka sebagai kandidat.

e. Masyarakat

Pendidikan politik bagi warga negara perlu dilakukan untuk menentukan pilihan yang cerdas. Namun pendidikan politik menjadi persoalan ketika hanya dilakukan oleh lembaga formal ataupun partai politik. Menurut Ari Dwipayana, seharusnya masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), juga melakukan pendidikan politik dengan melakukan pembelajaran secara horizontal (horizontal learning), untuk mengetahui sejauh mana mereka mengetahui secara cukup kandidat-kandidat yang muncul untuk dapat mewakili aspirasi mereka (www.ugm.ac.id).

Di tengah munculnya apatisme masyarakat terhadap pemilu, munculnya fenomena golongan putih (golput), juga memunculkan inisiatif-inisiatif masyarakat untuk mengorganisir dirinya dan masyarakat lain dengan melakukan diskusi dan dialog secara horisontal, sehingga mereka memiliki kriteria yang lebih jelas mengenai apa yang mereka inginkan. Pemilu dapat menjadi momentum yang berarti untuk masyarakat melakukan proses pembelajaran horizontal antar masyarakat saja. Informasi dasar yang harus diperoleh masyarakat diantaranya adalah rekam jejak (track record) dari para kandidat, Misalnya apakah kandidat

pernah melakukan pelanggaran HAM, pernah melakukan korupsi atau melakukan tindak pelanggaran lingkungan. Hal ini hanya bisa didapatkan melalui proses horizontal learning.

Lembaga Swadaya masyarakat juga dapat berperan penting dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas. Seperti halnya pendidikan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Akar Rumput. Kuliah berbasis masyarakat (*community based education*) merupakan salah satu aspek pengembangan program *civic education* dalam ranah yang lebih luas di tengah masyarakat (di luar lembaga pendidikan). Program ini dapat merupakan bagian integral dari pendidikan demokrasi di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan berbagai elemen masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya tentang pendidikan politik dan wawasan kebangsaannya.

Dalam rangka pendidikan politik, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), juga melakukan advokasi terhadap hak-hak politik rakyat melalui DPT dalam Pilpres. Hal ini dimaksudkan untuk mengawal dan menyelamatkan suara rakyat serta hak-hak politik warga negara. Persoalan carut marutnya DPT dalam Pemilu Legislatif menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat bahwa kinerja KPU dan pengawasan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu saja tidak cukup untuk mengawal pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Diperlukan lembaga yang berbasis masyarakat mengawal hak-hak politik rakyat.

D. Partisipasi Politik

Partisipasi yang meluas ciri khas modernisasi politik. Istilah partisipasi politik telah diartikan dalam berbagai arti, apakah partisipasi politik itu hanya perilaku atau mencakup pula sikap- sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi.

Partisipasi politik menurut Keith Fauls sebagaimana dikutip oleh Damsar adalah keterlibatan secara aktif (ithe active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

Dalam *international eccyclopedia of the social sciences*, Herbert McClosky memberikan batasan pengertian partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Berdasarkan buku Samuel P. Huntington dan Joan Nelson penulis merangkum defenisi inti yang perlu dicatat dalam partisipasi politik, yakni sebagai berikut:

- 1) Ia mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. Dimana kegiatan politik adalah yang objektif dan sikap-sikap politik yang subjektif.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

- 2) Yang diperhatikan dari partisipasi politik adalah kegiatan politik warga negara preman, atau lebih tepat lagi perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman. Dengan demikian ada hubungan antara partisipasi-partisipasi politik dan orang – orang profesional di bidang politik.
- 3) Yang menjadi pokok perhatian dalam partisipasi politik adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Usaha– usaha untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dapat melibatkan usaha membujuk atau menekan pejabat-pejabat untuk bertindak (atau tidak bertindak) dengan cara-cara tertentu.
- 4) Menurutnya bahwa partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah,tak peduli apakah kegiatan itu benar – benar mempunyai efek. Seorang partisipan politik dapat berhasil atau tidak akan dapat berkuasa atau tidak. Dalam pengertian ini, maka kebanyakan partisipan politik mempunyai kekuasaan yang kecil saja, dan hanya beberapa partisipan saja yang mencapai sukses yang cukup besar dalam politik

Pada era saat ini kita dapat melihat, bahwa tingkat partisipasi masyarakat tidak lagi dipengaruhi dimana ia tinggal atau dalam artian pedesaan atau perkotaan. “kesemuanya bergantung pada tingkat perekonomian setiap daerah apabila kita mengetahui bahwa tingkat partisipasi politik disuatu negara bervariasi sejalan dengan tingkat pembangunan ekonominya”.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya menuliskan lebih lanjut, bahwa partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai arti, adapun pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

Partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup sikap-sikap dan persepsi-persepsi (misalnya persepsi seseorang tentang relevansi politik bagi urusannya sendiri). Jika ditelusuri lagi secara spesifik, di dalam bukunya akhirnya didefinisikan bahwa partisipasi politik tidak hanya mencakup kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar sipelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Yang pertama dapat dinamakan partisipasi otonom, yang terakhir partisipasi yang dimobilisasikan. Masalah niat, dan persoalan yang berkaitan dengannya, yakni motivasi-motivasi partisipasi politik merupakan hal yang kompleks dan kontroversial.

Banyak orang bertindak, seperti: memberikan demonstrasi, yang merupakan jenis partisipasi tetapi tidak merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri melainkan dikarenakan adanya perintah orang lain yang disebut istilah "*Ward Boss*", istilah ini digunakan untuk orang-orang yang dengan menggunakan paksaan, persuasi atau dengan rangsangan-rangsangan materi mereka yang digunakan untuk memobilisasi orang-orang lain dalam usaha mengejar sasaran mereka. Dalam beberapa studi secara eksplisif tidak menganggap

tindakan yang dimobilisasi atau yang dimanipulasi sebagai partisipasi politik.

Banyak tanggapan mengenai apa itu partisipasi politik, jadi jelaslah banyak partisipasi di dalam sistem-sistem politik yang demokratis dan kompetitif mengandung suatu unsur tekanan dan manipulasi. Dalam penelitian ini, partisipasi yang dimobilisasi dan yang otonom bukan merupakan kategori-kategori dikotomis yang dapat di bedakan dengan satu tujuan satu sama lain. Yang benar keduanya adalah satu spectrum, terdapat perbedaan yang bersifat arbiter dan batas-batasnya tidak jelas. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan melihat partisipasi politik masyarakat yang terlihat atau yang dilakukan baik secara otonom maupun dimobilisasi yang ukurannya dapat dilihat dari bentuk partisipasi politik itu sendiri.

Sebagai defenisi umum, sesuai dengan yang diartikan oleh Miriam Budiarjo, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen. Partisipasi politik juga, senantiasa mengacu pada semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan cara terorganisir maupun tidak.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam buku Partisipasi Politik di

Negara Berkembang mendefenisikan konsep partisipasi politik sebagai kegiatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal.

Galen A. Irwin dalam tulisannya mengenai "*Polotical Efficacy, Statisfaction and Participation*", partisipasi politik adalah suatu bentuk proses yang sistematis untuk memilih kepala negara dengan jalan pemilu. Hasil pemilu haruslah dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai kebijakan bersama.

Menurut Thalha Hi Abu, adaptasi dari buku Michael Rush; Philip Althof, Pengantar Sosiologi Politik (1993:124) ada berbagai kesulitan dalam penyajian berbagai bentuk partisipasi politik, terlepas dari tipe sistem politik, yaitu: segera muncul dalam ingatan peranan para politisi profesional, pemberi suara, aktivis partai, para demonstran. Menempatkan posisi dari aktivis politik memang dirasa penting, untuk melihat apakah terdapat semacam hubungan hierarkis antara peristiwa-peristiwa di atas. Hierarki yang paling sederhana dan berarti adalah hierarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi. Namun demikian didapati tingkat hierarki partisipasi politik yang bebrbeda dari suatu sistem politik dengan yang lain, tetapi partisipasi pada suatu tingkat hierarki tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada suatu tingkatan yang berbeda-beda dalam suatu sistem politik dengan sistem politik lain, lagipula berbeda dalam suatu sistem menurut waktunya. Hierarki partisipasi politik :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- **Apatihi Total (masa bodoh)**, ini merupakan bentuk partisipasi yang paling rendah, bahkan pada bentuk ini sebagian masyarakatnya menghindari berbagai bentuk partisipasi politik, ataupun hanya berpartisipasi pada tingkat yang paling rendah.
- **Voting (pemberian suara)**, pada bentuk ini partisipasi yang dilakukan adalah berupa pemberian suara pada saat pemilu.
- **Partisipasi dalam diskusi politik informal**, minat umum dalam politik. Pada bagian ini partisipasi yang dilakukan adalah diskusi secara informal dalam ruang lingkup keluarga, teman, terkadang ditempat kerja.
- **Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan lain-lain**. Partisipasi ini lebih nyata dari pada diskusi politik informal.
- **Keanggotaan pasif organisasi semu politik.**
- **Keanggotaan aktif organisasi semu politik.**
- **Keanggotaan pasif suatu organisasi politik.**
- **Keanggotaan aktif suatu organisasi politik.**
- **Mencari jabatan politik atau administratif.**
- **Menduduki jabatan politik atau administratif**. Ini merupakan partisipasi politik tertinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

BH. Ericson (2008:156) dalam bukunya “memahami data statistik untuk ilmu sosial” mengatakan: “Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian, pada dasarnya populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui”.

Sedangkan sample berarti contoh, yaitu sebagian dari hal yang menjadi objek penelitian. Menurut Sapari Iman Asyari, yang dimaksud dengan sample adalah : “contoh yang dapat mewakili populasi atau cermin dari keseluruhan objek yang diteliti”.

Menurut Suharsimi Arikunto (2003:70) dalam bukunya prosedur penelitian: “Apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi populasi sekaligus sample yang penulis ambil adalah semua personil kepegawaian yang terdapat di Kantor Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Kabupaten Deli Serdang.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan, dalam penulisan ini penulis menggunakan :

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dan diperoleh dari buku-buku, artikel, mas media, dan lain sebagainya.

2. Penelitian Lapangan.

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun kelapangan untuk mengadakan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini melalui :

- Interview/wawancara dengan sumber-sumber yang dirasakan penulis dapat memberikan masukan.
- Pengamatan/observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati keadaan di lapangan secara langsung.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan salah satu unsur dari suatu penilaian. Dalam penelitian ini ada 2 variabel yang saling berpengaruh.

1. Variabel bebas (Independent Variable)

Variabel bebas adalah: “sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi munculnya gejala atau faktor atau unsur yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

lain, yang pada gilirannya gejala atau unsur yang kedua disebut variabel terikat.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Kesbang Linmas Pol, dengan indikatornya yaitu :

- Tugas
- Fungsi dan
- Kedudukan

2. Variabel terikat (Defedent Variable)

Variabel terikat adalah : “Sejumlah gejala atau faktor atau unsur yang ada atau muncul yang dipengaruhi atau ditentukan dengan adanya variabel bebas.”

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah: “Pembangunan Politik Masyarakat,” dengan indikatornya yaitu :

- Terjadinya interaksi yang baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan aparatur pemerintah.
- Peningkatan pembangunan.
- Pemerataan pembangunan baik fisik material maupun mental spritual yang berkesejahteraan.

D. Metode Analisis Data

Penganalisaan data yang diperoleh melalui penelitian harus dilaksanakan hipotesis atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga dapat dengan jelas kita simpulkan apakah hipotesis diterima atau tidak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/9/23

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka dipergunakan metode analisa sebagai berikut :

1. Analisa deskriptif yakni mengklasifikasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberi gambaran terhadap permasalahan.
2. Analisa komperatif yakni membandingkan antara teori dan data-data yang diperoleh dari lapangan.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dari hasil temuan penelitian didapat bahwa pemahaman politik di kalangan masyarakat agak rendah dan juga didapat bahwa rata-rata mereka mendapatkan pengetahuan politik dari keluarga.
2. Partisipasi politik di kalangan masyarakat agak rendah, kategori ini didapat melalui serangkaian tanggapan berupa sikap-sikap yang apatis dan keinginan untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik seperti : pemilu di samping itu banyak para masyarakat beranggapan bahwa para kontestan pemilu tidak mewakili aspirasi mereka dalam hal menyampaikan kepentingan-kepentingan rakyat banyak.
3. Dari temuan penelitian didapat bahwa hubungan antara upaya Kesbang Linmas terhadap pembangunan politik masyarakat sangat rendah (0,3158).

B. Saran

1. Pemahaman politik perlu diperbaiki agar lebih memberikan hasil yang diharapkan. Seperti meningkatnya partisipasi politik hal ini dapat dilakukan pendidikan yang lebih intensif dapat meningkatkan pengetahuan politik masyarakat dan selanjutnya dapat meningkatkan kesadaran politik para masyarakat.

2. Agar terciptanya mekanisme politik yang baik, yaitu dengan berjalannya partisipasi politik, maka sebaiknya dibuat perencanaan yang memberikan kesempatan lebih besar untuk mengikuti sistem kaderisasi rapat umum maupun pemilihan umum.
3. Berdasarkan kecenderungan pemahaman politik dengan partisipasi politik perlu diadakan pertemuan langsung atau tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh politik dan tokoh-tokoh yang berkompeten untuk itu.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari Dewi, *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Pattiro. Jakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- Bayu Suryaningrat, *Perumusan Kebijaksanaan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta, 2009.
- BH. Ericson dan T. Nomsamchue, *Memahami Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2008.
- Budi Winarno, *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta, 2002.
- Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 2000.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 2006.
- Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosiologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Sutopo dan Sugiyanto. *Analisis Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta, 2001.
- Talizuddin Ndraha , *Pengertian Desa dan Pembangunar: Desa*, Yayasan Karya Darma II, Jakarta, 2007.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Winardi , *Azas-Azas Manajemen*, Alumni Bandung, 2009.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

WJS Poerdarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka. Jakarta, 2003.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area